

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Korea Selatan dan Korea Utara memiliki sejarah yang panjang sebagai satu negara hingga akhirnya terpecah akibat terjadinya perang Korea yang dimulai pada tahun 1950. Perang yang terjadi antara kedua negara ini merupakan dampak dari perang dingin antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Dalam perang ini, Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat, serta Korea Utara didukung oleh pemerintah Uni Soviet. Pada tahun 1953, perang ini resmi berakhir dengan adanya gencatan senjata antara kedua belah pihak. Meskipun demikian, bukan berarti kedua negara lepas dari konflik dan berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1990 bukan menjadi jaminan berakhirnya perang antara kedua kubu Korea (Suh D. M., 2013).

Pemerintahan Korea Utara menganut ideologi *Juche* yang dikemukakan oleh Kim Il-Sung pada tahun 1955. Secara konseptual, ideologi ini berarti otonom dan independen (*Self-Reliance*) atau berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain dan kemudian dikembangkan sebagai ideologi nasional bagi sebagian besar rakyat Korea Utara untuk mencapai cita-cita negara sebagai sebuah negara sosialis yang sama rasa, sama rata tanpa harus bergantung dan berhutang dari negara-negara asing yang kapitalis (Armstrong, 2009). Hal ini sudah jelas berbeda dengan Korea Selatan yang merupakan negara demokrasi dengan kebebasan untuk berpendapat dan juga ekonomi dengan pasar terbuka (Fiori & Kim, 2018).

Hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara tidak selalu berada pada satu titik yang sama, melainkan terus menerus mengalami perubahan. Korea Selatan dan Korea Utara memiliki hubungan yang cukup baik selama beberapa saat ketika Korea Selatan dibawah pemerintahan Kim Dae Jung. Pada masa ini, Korea Selatan dan Korea Utara menunjukkan kemauannya untuk rukuk melalui kebijakan *Sunshine*

Policy yang di inisiasikan oleh Kim Dae Jung, presiden dari Korea Selatan. Kebijakan ini berfokus pada pendekatan secara damai dengan menjamin kerjasama di bidang ekonomi dan kemanusiaan. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga diharapkan oleh kedua belah pihak untuk bisa menjadi alat yang mendorong reunifikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara (Sugianto, 2016).

Kebijakan ini berjalan dengan cukup baik meskipun pada tahun 2002 terjadi eskalasi konflik yang merenggangkan hubungan kedua belah pihak. Akan tetapi, hubungan ini kembali membaik ketika Korea Selatan dibawah kepemimpinan Roh Moo Hyun dengan konsistensinya untuk reunifikasi Korea yang mendapatkan respon baik oleh Korea Utara dibawah kepemimpinan Kim Jong Il. Kebijakan ini terbukti sukses mempertahankan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara hingga tahun 2007 (Lor, 2015). Selama kebijakan ini berlangsung, Korea Selatan dan Korea Utara melakukan beberapa kerjasama melalui kegiatan – kegiatan, dan salah satunya adalah pertukaran budaya. Melalui kerjasama pertukaran budaya ini, Korea Selatan memperkenalkan budaya pop *hallyu* untuk yang pertama kali kepada Korea Utara.

Hallyu merupakan salah satu alat diplomasi budaya terkuat milik Korea Selatan yang terdiri dari musik, film, drama dan juga *fashion*. Budaya ini berkembang dan menyebar di daerah Asia Timur pertama kalinya pada tahun 1990-an dengan drama berjudul *Winter Sonata*, hingga akhirnya menyebar secara internasional ke berbagai belahan benua. Hal ini bisa dilihat melalui meningkatnya perhatian terhadap budaya Korea, orang – orang asing yang pindah ke Korea untuk mencapai “*Korean Dream*”, meningkatnya jumlah wisatawan yang mengunjungi Korea Selatan, serta peningkatan penghasilan tahunan industri budaya di Korea Selatan (Young, 2012). *Hallyu* secara resmi diperkenalkan oleh pemerintah Korea Selatan pada masyarakat Korea Utara melalui musik pada tahun 2003 dengan mendatangkan beberapa idola *K-Pop* ke Pyeongyang, seperti Baby V.O.X dan Shinhwa.

Meskipun demikian, kebijakan *Sunshine Policy* ini tidak bisa bertahan lama, karena setelah tahun 2007, intensitas kerjasama antara Korea Selatan dan Korea Utara

akhirnya berkurang terus menerus akibat percobaan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara hingga akhirnya gagal dan berakhir pada era Lee Myungbak. Konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara terus menerus semakin intens ketika Korea Utara kembali mengembangkan teknologi nuklirnya (Lor, 2015).

Ideologi *Juche* yang dikembangkan oleh pemimpin pertama Korea Utara, Kim Il-Sung, sudah melekat pada Korea Utara dan menjadi identitas dari negara tersebut. Pemerintah Korea Utara melakukan berbagai cara untuk meyakinkan masyarakat Korea Utara bahwa *Juche* adalah pegangan hidup mereka sebagai warga Korea Utara, dan salah satu cara pemerintah Korea Utara mempromosikan nilai *Juche* ini adalah dengan mempropaganda masyarakatnya melalui pendidikan dan juga film – film. Propaganda melalui media ini sangat gencar dilakukan oleh pemerintah Korea Utara, terutama pada era kepemimpinan Kim Jong Il (Judkis, 2011).

Propaganda menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk mempromosikan nilai – nilai *Juche*. Salah satu bentuk propaganda yang dilakukan oleh Korea Utara adalah dengan menggunakan media film. Pemimpin Korea Utara sebelumnya, yaitu Kim Jong Il sendiri merupakan salah satu penggemar budaya dan seni termasuk film, yang mana memiliki koleksi film hingga 20.000 keping. Selain itu, Kim juga mengidolakan Elizabeth Taylor dan James Bond. Kim memanfaatkan media film bahkan hingga menculik dua orang Korea Selatan yang bekerja di industri hiburan, yaitu Shin Sang Ok, seorang sutradara film dan juga istrinya, Choi Eun Hee yang merupakan aktris Korea Selatan untuk membuat film propaganda mengenai kehebatan pemerintah Korea Utara melalui film *Pulgasari* dan *Godzilla* (Judkis, 2011).

Meskipun demikian, propaganda yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara mulai gagal karena masyarakatnya mulai mengenal *hallyu* dan menikmati budaya hiburan dari negara yang tidak lain adalah Korea Selatan. Mengakses musik dan drama Korea Selatan melalui internet seadanya di Korea Utara adalah ilegal dan dapat dikenai sanksi, akan tetapi, masih banyak saja masyarakat Korea Utara yang

tetap melakukan akses ilegal terhadap *hallyu*. Seorang warga Korea Utara, Ho Hye Il menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “*The North Korean Show Box*” bahwa ketertarikan masyarakat Korea Utara sangat besar terhadap drama Korea Selatan yang disebutkannya melalui banyaknya hasil razia yang dilakukan di Universitas Kim Il-Sung pada tahun 2002, dimana diperoleh sekitar 600 kg CD tentang film – film Korea Selatan serta publikasi lainnya secara illegal (Il, 2006).

Selain itu, dalam wawancara lainnya yang dilakukan terhadap warga Korea Utara dalam buku “*Ask A North Korean*” karya Daniel Tudor, disebutkan mengenai adanya pengaruh dari film – film serta acara hiburan dari Korea Selatan terhadap pandangan mereka terhadap Korea Selatan yang mana mereka melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang ingin mereka rasakan dan banyak dari mereka merasakan kenyamanan setelah menyebrang ke Korea Selatan (Tudor, 2017).

Ketertarikan masyarakat Korea Utara terhadap *hallyu* dan semakin banyaknya produk *hallyu* yang menyaingi propaganda dari pemerintah Korea Utara dinilai pemerintah sebagai suatu ancaman bagi Korea Utara. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana *hallyu* mengancam *juche* dan juga bagaimana pemerintah Korea Utara merespon penyebaran budaya pop *hallyu* dalam masyarakatnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini kemudian mencoba mendeskripsikan:

1. Bagaimana *Hallyu* mengancam *Juche*?
2. Bagaimana respon rezim Korea Utara terhadap persebaran *hallyu* di Korea Utara?

1.3. Kerangka Pemikiran

1.3.1. Globalisasi Budaya

Globalisasi dijelaskan sebagai suatu fase dimana jarak antar benua semakin mengecil, munculnya kerentanan geografis yang meluas dan keterkaitan dunia mengenai aspek – aspek penting dalam kehidupan manusia, seperti agama, migrasi, perang, keuangan, perdagangan, penyakit, obat – obatan hingga musik. Adanya globalisasi menghilangkan batas – batas hubungan antara eksternal dan internal negara, sehingga perbedaan yang terdapat dalam suatu negara dan negara lainnya melemah (Payne, *Global Issues: Challenges of Globalization*, 2012). Definisi lain dari globalisasi juga dijelaskan oleh Robert Shuey (2001) bahwa globalisasi merupakan suatu istilah yang digunakan secara luas untuk menjelaskan mengenai proses integrasi ekonomi, sosial serta politik yang cepat dan terbaru. Globalisasi juga dipercaya dapat merubah berbagai hubungan antar kekuasaan. Di level politik domestik, adanya globalisasi merubah hubungan kekuasaan antara pemerintah, bisnis dan juga masyarakat sipil. Hal yang paling dasar, adanya globalisasi merubah prospek mengenai perdamainan di dalam suatu negara maupun diantara masyarakat dan pemerintahnya (Bank, 2002).

Globalisasi mulai muncul terjadi karena adanya rasa ingin tahu manusia yang besar untuk melakukan eksplorasi. Eksplorasi ini dilakukan atas dasar untuk mendapatkan keamanan secara fisik dan ekonomi yang lebih baik, mengembangkan kreativitas dan juga keinginan untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya (Payne, 2012, hal. 10). Globalisasi sendiri sudah berlangsung sejak awal peradaban manusia dan terus berkembang hingga hari ini, dimana dunia internasional semakin dipermudah dengan adanya perkembangan teknologi yang memperbolehkan manusia untuk dapat memperoleh informasi dari seluruh belahan dunia melalui internet, televisi dan media informasi canggih lainnya. Payne (2012) menjelaskan ada enam bentuk globalisasi, yaitu globalisasi ekonomi dan perdagangan, globalisasi finansial, globalisasi politik, globalisasi militer, globalisasi budaya, globalisasi lingkungan dan juga globalisasi kejahatan.

Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus untuk menggunakan globalisasi budaya dalam menganalisa *hallyu* di Korea Utara. Menurut Hofstede, budaya adalah pemrograman pikiran kolektif yang membedakan satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya. Pikiran dalam hal ini adalah cara berpikir, perasaan dan juga tindakan secara kolektif. Nilai dan juga sistem merupakan inti dari elemen budaya (Hofstede, 2001). Bentuk dari budaya sendiri bersifat dinamis yang mana budaya dapat terus berkembang menyesuaikan zaman. Adapun bentuk dari budaya dibagi menjadi dua, yaitu secara fisik dan non-fisik (Koentjaraningrat, 1982). Budaya secara fisik adalah benda – benda peninggalan sejarah yang dapat dilihat secara langsung, sementara budaya secara non-fisik berbentuk norma, nilai, gagasan dan juga pesan moral. Globalisasi budaya didefinisikan sebagai transmisi ide dan nilai – nilai dari seluruh dunia untuk memperluas dan meningkatkan hubungan sosial (James, 2006). Globalisasi budaya dapat dikatakan sebagai bentuk paling familiar dari interdependensi bagi kebanyakan orang karena perkembangannya yang mengikuti kapitalisme global dan transparansi informasi (Payne & Nassar, 2016). Sebagai contohnya, hampir seluruh orang di muka bumi ini mengenal bintang olahraga dan ikon dari budaya populer. Hal ini berarti seluruh dunia sudah terhubung dengan simbol budaya dan juga nilai – nilai yang berasal dari wilayah lain. Adanya globalisasi juga menantang nilai – nilai tradisional serta mengekspos individu terhadap berbagai jenis ide, pengetahuan bahkan gaya hidup (Payne & Nassar, 2016).

Mudahnya akses terhadap informasi memudahkan individu untuk membuat keputusan secara bebas, meskipun keputusan tersebut bertentangan dengan nilai – nilai budaya yang ada. Adanya globalisasi budaya ini memungkinkan masyarakat di negara terbelakang untuk melihat kemewahan yang ada di negara – negara maju melalui film, majalah, televisi dan juga gaya hidup yang mengangumkan. Masyarakat di negara – negara terbelakang akan mulai membanding – bandingkan kehidupannya dengan orang – orang yang ada di negara lain. Melalui globalisasi, masyarakat yang ada di negara terbelakang akan mulai bermimpi untuk memiliki kehidupan yang sama dengan negara lainnya (Payne, 2012, hal. 244). Dalam globalisasi sendiri ada tiga skenario budaya, yaitu Homogenisasi, Heterogenisasi dan juga Hibridasi.

Homogenisasi meyakini bahwa munculnya suatu budaya baru dalam masyarakat akan menghasilkan sebuah budaya global yang mana budaya tersebut akan memiliki persamaan nilai, norma dan muncul standarisasi budaya. Dalam perspektif ini, hubungan antar negara dan budaya semakin meningkat. Tingkat dari homogenisasi budaya lainnya disebut dengan konvergensi (Ritzer, 2010). Dalam aspek budaya, konvergensi melihat globalisasi sebagai sebuah proses dimana budaya – budaya menjadi semakin mirip, yang mana hal ini terjadi karena adanya peran penting dari kelompok dominan dan masyarakat dunia. Meskipun demikian, Ritzer mengatakan bahwa adanya kecenderungan budaya yang semakin mirip, tidak menjadikan budaya lokal menjadi hilang (Ritzer, 2011).

Skenario kedua adalah heterogenitas, yang mana diyakini bahwa globalisasi memunculkan keadaan yang heterogen dimana satu budaya dapat terhubung dengan budaya lainnya dalam dimensi tertentu. Skenario ini mengatakan bahwa tidak semua orang bisa menerima perubahan dari globalisasi karena sekelompok masyarakat nyatanya masih memegang teguh nilai – nilai lokal. Terakhir adalah skenario hibridasi, dimana dalam hal ini dikatakan bahwa globalisasi mengakibatkan perpaduan antara satu budaya dengan budaya lainnya yang akhirnya menghasilkan budaya baru (Ritzer, 2010).

Kluser dan Fu menggunakan empat indikator untuk mengindikasikan suatu negara telah mengalami globalisasi budaya. Yang pertama, suatu negara dikatakan mengalami globalisasi budaya melalui film – film. Mereka menjelaskan bahwa ketika suatu negara terus menerus memutar film dari luar negeri, maka globalisasi budaya telah terjadi di negara tersebut. Kedua, melalui program televisi luar negeri yang di buat versi dalam negerinya. Ketiga adalah jumlah dari akses publikasi yang diterima seperti buku, koran, majalah atau media lainnya. Yang terakhir adalah munculnya ketersediaan saluran satelit dari sistem televisi luar negeri (Kluser & Fu, 2004). Keempat indikator ini sendiri pada intinya berpusat pada jumlah akses masyarakat terhadap produk media komunikasi massa yang diterima dari luar negeri.

Globalisasi budaya juga dapat membawa tantangan pada suatu negara dan juga institusi nasional. Hal ini dikarenakan media dan budaya seringkali di identikkan

dengan institusi nasional. Selain itu, dikatakan bahwa media dan juga budaya merupakan inti dari identitas nasional (Janssen, Kuipers, & Verboord, 2008).

1.3.2. Hallyu

Hallyu atau yang berarti Gelombang Korea merupakan suatu fenomena yang mengacu pada dampak dari produk budaya Korea Selatan secara spesifik seperti film, musik, makanan, *games* dan *fashion* (Marinescu, 2014). Istilah *hallyu* pertama kali digunakan oleh media Cina pada tahun 1998 untuk menggambarkan kegemaran luar biasa remaja - remaja Cina yang terhadap produk budaya populer Korea. Perkembangan *hallyu* di Cina sendiri dimulai ketika remaja Cina pertama kali diperkenalkan dengan *K-Pop* melalui sebuah program radio bernama *Seoul Music Room* yang disiarkan di Beijing. *Hallyu* semakin populer ketika salah satu *boygroup* dari Korea Selatan, *H.O.T* melakukan konser di *Beijing Workers' Gymnasium* pada Februari 2000 (Ministry of Culture, 2020). Tidak hanya di Cina, *hallyu* juga mulai dikenal di Jepang melalui drama "*Winter Sonata*" yang juga digemari oleh masyarakat Jepang pada tahun 2003 (Lee S. , 2015). Drama lain yang juga membesarkan fenomena *hallyu* di negara lainnya adalah "*The Jewel in the Palace*" yang popularitasnya sangat besar di Cina, Taiwan, Hongkong bahkan di Asia Tenggara pada pertengahan tahun 2000an dan juga negara di Timur Tengah pada akhir tahun 2000an. Drama ini telah terjual kepada lebih dari 120 negara dari Asia, Eropa, Timur Tengah dan juga Amerika Selatan (Yoon & Kang, 2017). *Hallyu* semakin dikenal lagi ketika lagu yang berjudul "*Gangnam Style*" yang dipopulerkan oleh *PSY* menjadi video paling banyak ditonton di *youtube* pada tahun 2012 (Kim Y. , 2013).

Industri budaya Korea dikembangkan pada akhir tahun 1990an untuk kepentingan sosial ekonomi, budaya dan juga politik. Pemerintah Korea melihat hal ini sebagai salah satu jalan untuk menunjukkan 'wajah' yang dinamis dari negaranya melalui *soft power*. Sejak krisis Asia pada tahun 1997, pemerintah Korea sudah menargetkan ekspor budaya populer *hallyu* sebagai inisiasi ekonomi baru untuk menyokong perekonomian (Kim Y. , 2013, hal. 3).

Hallyu berhasil memikat hati masyarakat internasional, terutama masyarakat di Asia. Oleh karena itulah, *hallyu* merupakan bentuk dari globalisasi yang mengalir bukan dari barat ke timur, melainkan timur ke timur. *Hallyu* disebut sebagai indikasi dari transformasi baru global di aspek budaya dan ekonomi (Yoon & Kang, 2017, hal. 11). Kepopuleran *hallyu* yang mendunia meningkatkan kunjungan turis asing ke Korea Selatan, tidak terkecuali masyarakat Korea Utara. *Hallyu* telah tersebar hingga bahkan ke negara terisolasi seperti Korea Utara. Adanya persebaran *hallyu* di Korea Utara juga telah mempengaruhi sedikit banyak masyarakat Korea Utara dari berbagai aspek kehidupan yang akan dijelaskan lebih rinci pada bab – bab selanjutnya.

1.3.3. *Juche*

Juche sendiri berasal dari kata 主 (Zhǔ) yang berarti tuan, pemilik atau penguasa dan 體 (Tǐ) yang berarti tubuh, esensi atau hakikat. Apabila diartikan secara menyeluruh maka artinya adalah penguasa atas diri sendiri, dan lebih dikenal dengan *self-reliance* dalam istilah politik. Ideologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Kim Il-Sung pada tahun 1955. *Juche* sendiri menerapkan gabungan dari prinsip – prinsip Maoisme, Stalanisme dan juga Marxisme-Leninisme, yang akhirnya diterapkan menjadi Konstitusi Korea Utara pada tahun 1972 (Trofoi, 2017). Didukung dengan pidato Kim pada tahun 1955 mengenai *Juche* yang mengajak masyarakat untuk menerima dogma domestik dan tidak bergantung pada pengalaman negara lain. Sebaliknya, dia mengajak masyarakat Korea Utara untuk melihat revolusi sosialis negara lain seperti Cina dan Uni Soviet untuk menstruktur pendekatan mengenai revolusi sosialis Korea (Trofoi, 2017, p. 8). Dengan demikian, Korea Utara percaya bahwa mereka dapat bertahan dan membuka jalan sendiri dengan bersandar pada pemikiran dan semangat mereka sendiri daripada bergantung pada negara lain melalui paksaan imperialisme (Suh 1988, 302). *Juche* sendiri sudah dikenal sebagai basis yang tepat untuk dikatakan sebagai identitas nasionalis Korea Utara (Ranieri, 2017).

Ideologi ini sendiri memiliki 3 elemen utama yaitu, alam, masyarakat dan manusia yang semua berpusat pada pemimpin. Adapun indikator keberhasilan tercapainya *juche* terdiri dari tiga bagian yaitu *chaju* (*independence*), *charip* (*self-*

sustenance), dan juga *chawi* (*self-defense*). Pertama, melalui *chaju*, pemerintah Korea Utara ingin mencapai revolusi sosialis, dimana yang dimaksud dengan revolusi sosialis disini adalah tercapainya masyarakat sosialis dengan nilai – nilai Korea yang dipimpin oleh Kim Il-Sung. Kedua, *charip* yang berfokus pada aspek perekonomian, dimana pemerintah Korea Utara ingin memusatkan sistem perekonomian di Korea Utara kepada pemerintah. Yang terakhir adalah *chawi* yang berfokus pada aspek militer, dimana Korea Utara ingin membebaskan dirinya dari imperialisme dengan memperkuat militer mereka. Pandangan ini percaya bahwa manusia dapat menggunakan kebebasan, kreativitas yang dia peroleh sendiri untuk menaklukkan alam semesta dan menjadikan dunia sesuai dengan keinginannya (Suh D. , 1988). Revolusi sosialis sebagai tujuan utama dari *juche* diyakini dapat tercapai melalui kesetiaan masyarakat terhadap pemerintahnya dan oleh sebab itulah, pemerintah Korea Utara terus menerus menggencarkan propaganda dalam negeri untuk dapat mencapai tujuan – tujuan dari *juche* itu sendiri.

Fokus dari *Juche* sendiri sempat hilang dari pemerintah Korea Utara ketika Kim Il-Sung meninggal pada tahun 1994 dan terjadi krisis kelaparan yang besar pada era kepemimpinan Kim Jong-Il dan mengancam perekonomian Korea Utara, sehingga Kim memfokuskan politiknya kepada militer untuk mengalihkan perhatian publik dari krisis domestik yang terjadi dan mengamankan legitimasinya sebagai pemimpin (Easley, 2017). Akan tetapi, di era Kim Jong Un, ideologi dari *Juche* ini kembali diterapkan secara efektif melalui pidato Kim yang mengatakan bahwa Korea Utara akan mempertahankan kebebasannya dan memperkuat politik, militer dan juga ekonomi serta tambahan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi serta budaya (Easley, 2017).

1.4. Metodologi Penelitian

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang mana penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat

populasi tertentu atau mencoba menggambarkan suatu fenomena secara detail (Yusuf, 2017). Dalam hal ini, penulis bermaksud untuk memahami ancaman budaya pop *hallyu* terhadap keamanan Korea Utara secara detail.

1.4.2. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pandangan masyarakat Korea Utara dan respon pemerintah atas persebaran *hallyu* mulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2018 dimana kedua belah pihak sudah setuju untuk menandatangani perjanjian Panmunjeom dan dimulainya kerjasama budaya dari kedua belah pihak.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*Library Research*) ataupun dokumentasi, dimana informasi yang dicantumkan dalam penelitian ini merupakan hasil dari bacaan buku – buku terkait dengan penelitian penulis, jurnal – jurnal internasional, serta berita – berita terbaru dari berbagai media online (daring). Selain itu, penulis juga akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan *simple random sampling*. Pada prinsipnya teknik penelitian ini dilakukan secara undian atau lottere. Perbedaan karakter yang mungkin ada pada setiap unsur atau elemen populasi tidak menjadi hal penting bagi rencana analisisnya (Yusuf, 2017).

1.4.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah teknik data kualitatif. Menurut Erickson (1968), penelitian kualitatif merupakan suatu metodologi untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan. Data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan pernyataan mengenai isi, sifat, ciri dan keadaan dari suatu peristiwa dan hubungannya antara satu sama lain. Data – data tersebut akan berbentuk nilai – nilai, norma – norma, pola perilaku dan interaksi sosial dan aturan yang

dikategorika ke dalam sosial budaya. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan latar yang alamiah (*natural setting*) dan peneliti sebagai instrument utama dalam mengumpulkan dan mengintepretasikan data (Anggito & Setiawan, 2018).

1.4.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan mengenai pendahuluan dari penelitian tersebut, dimana penulis akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, serta kerangka teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini. Penulis juga menjelaskan mengenai metodologi terkait penelitian seperti tipe penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab II : Penyebaran Budaya Pop *Hallyu* di Korea Utara

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana sejarah perkembangan budaya pop *hallyu* di Korea Utara yang akan dibagi menjadi dua sub-bab. Pertama, penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana sejarah masuknya *hallyu* ke Korea Utara dan yang kedua, bagaimana reaksi masyarakat terhadap budaya pop *hallyu*.

Bab III : Analisis *Hallyu* Sebagai Ancaman bagi Korea Utara dan Reaksi Pemerintah terhadap *Hallyu*

Dalam bab ini, penulis akan membagi penjelasan menjadi dua sub-bab. Pada sub-bab pertama, penulis akan menjelaskan bagaimana *hallyu* sebagai menjadi ancaman terhadap identitas *Juche* Korea Utara dengan menggunakan konsep globalisasi budaya. Selanjutnya, pada sub-bab kedua, penulis akan menjelaskan bagaimana reaksi pemerintah Korea Utara terhadap persebaran *hallyu* di Korea Utara

Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran penulis secara menyeluruh dalam menjelaskan inti dari penelitian yang telah dibahas di bab – bab sebelumnya.